

Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Finansial terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah

Nur Aulia Hasana¹, Gerry Hamdani²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP, Padang

E-mail: nura64320@gmail.com¹, gerryhamdaniputra@akbpstie.ac.id²

Abstrak

Studi ini dilaksanakan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi standar akuntansi pemerintahan dan kualitas pelaporan finansial memdampaki akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Fokus studi ini yaitu pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat, dengan memilih sampel sebanyak 40 pegawai melalui *convenience sampling*. Studi ini menggunakan tes regresi berganda untuk analisis data. Temuan studi menunjukkan bahwa ketaatan terhadap standar akuntansi memberikan dampak positif terhadap tingkat akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, dan kualitas laporan finansial juga berdampak positif terhadap tingkat akuntabilitas tersebut. Studi ini berupaya untuk memberikan wawasan yang berharga, menganjurkan prioritas penerapan standar akuntansi pemerintah dan produksi laporan finansial berkualitas tinggi untuk meningkatkan kinerja pegawai secara keseluruhan melalui peningkatan akuntabilitas.

Kata Kunci: Standar Akuntansi, Kualitas Laporan finansial, Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah, Akuntansi Pemerintahan.

Abstract

This study was conducted to explore how the implementation of government accounting standards and the quality of financial reporting impacts the accountability of the performance of government institutions. The focus of this study is employees at the Regional Civil Service Agency (BKD) of West Sumatra Province, by selecting a sample of 40 employees through convenience sampling. This research uses multiple regression tests for data analysis. Research findings show that compliance with accounting standards has a positive impact on the level of accountability for the performance of government institutions, and the quality of financial reports also has a positive impact on this level of accountability. This research seeks to provide valuable insights, advocating the priority implementation of government accounting standards and the production of high-quality financial reports to improve overall employee performance through increased accountability.

Keywords: *Accounting Standards, Quality of Financial Reports, Performance Accountability of Government Institutions, Government Accounting.*

Diterima;; Direvisi;; Disetujui:

How to cite:	Nama Author. (Tahun). Judul Artikel. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan Vol X(Nomor):Halaman
E-ISSN:	
Published by:	

PENDAHULUAN

Perubahan pandangan pelaksanaan birokrasi yang pada mulanya berorientasi kerja (*output*) menuju birokrasi yang berfokus pada hasil (*result*) ialah inti dari akuntabilitas kinerja. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengungkapkan bahwa setiap pemerintah wajib melakukan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja itu sendiri ialah pemenuhan tugas pemerintah unruk mempertanggungjawabkan kesuksesan atau tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisas. Selain itu, tertera juga pada PP Nomor 8 Tahun 2006 pasal 20 yang menyebutkan bahwa laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem yang bernama Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintahan (SAKIP). SAKIP tercantum untuk Perpres Nomor 29 Tahun 2014 yang mana didalamnya disebutkan bahwa SAKIP ialah serangkaian kegiatan, alat serta mekanisme yang didesain untuk suatu sasaran dalam menetapkan, menghitung, menghimpun data, mengelompokkan, menyimpulkan, dan menyajikan kinerja di lembaga pemerintah (Meliana, 2022).

Pelaporan kinerja diamanatkan oleh beberapa peraturan, antara lain Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 mengenai pelaporan finansial dan penatausahaan di lembaga pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang kerangka akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, serta Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan. Kontrak Kinerja, Hasil Pelaporan, dan Tata Cara Pelaporan Lembaga Pemerintah. Untuk memperbaiki akuntabilitas di wilayah kementerian dan lembaga, Reformasi Birokrasi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan Akuntabilitas Kinerja dan Finansial sebagai elemen sentral dalam menilai upaya-upaya Reformasi Birokrasi yang dikerjakan oleh kementerian dan lembaga tersebut. Indikator utama untuk Kinerja dan Akuntabilitas Finansial tersebut adalah Pendapat Badan Pemeriksa Finansial (BPK) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Noormansyah, 2022).

Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dapat dimaknai sebagai tanggung jawab individu atau pihak yang berwenang dalam mengurus sumber daya public dan hal-hal terkait. Hal ini memerlukan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas mereka sebagai sarana pengawasan kegiatan, khususnya dalam mencapai hasil dalam pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja dibentuk oleh berbagai faktor, seperti penerapan akuntan publik, kualitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, standar pelaporan finansial, standar akuntansi pemerintahan, kejelasan tujuan anggaran dan pengendalian akuntansi, persaingan antar pejabat pemerintah daerah, motivasi kerja, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, antara lain (Herawati, 2019).

Persoalan ketidakstabilan akuntabilitas dalam kinerja lembaga pemerintah merupakan permasalahan yang penting untuk diselidiki. Salah satu kasus penting di pemerintahan adalah Pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (SAKIP) di 186 pemerintah daerah di Wilayah III, yang menghasilkan penghematan anggaran yang cukup besar sebesar Rp 6,9 triliun di tahun 2018. Tindakan penghematan ini dicapai lewat penyederhanaan program lintas sektoral, kemudian disempurnakan melalui inisiatif pemfokusan ulang untuk menyelaraskan anggaran dengan target secara lebih akurat. SAKIP mengubah paradigma kinerja pemerintah, mengalihkan fokus dari sekedar melaksanakan program yang dianggarkan menjadi mencapai target dengan cara yang paling efekyif dan juga efisien. Efisiensi ini berkaitan dengan penghematan yang diwujudkan melalui SAKIP tidaklah termasuk kebocoran. Sebaliknya, SAKIP memastikan jika anggaran dialokasikan untuk mendanai program atau kegiatan utama yang kondusif bagi realisasi target pembangunan. Penghematan anggaran diwujudkan melalui menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang tidak

memberikan kontribusi terhadap kinerja lembaga. Pemaparan hasil evaluasi SAKIP bukanlah sebuah kompetisi yang berpusat pada angka dan nilai; sebaliknya, hal ini menjadi tonggak sejarah yang membuka jalan bagi perubahan yang didorong oleh kinerja. Evaluasi ini mengkategorikan lembaga pemerintah, tidak semata-mata untuk tujuan penilaian, akan tetapi untuk mengukur tingkat penerapan manajemen kinerja di masing-masing badan, sehingga memfasilitasi inisiatif perbaikan pada penerapan SAKIP. Proses penerapan SAKIP diawali dengan perumusan strategi masing-masing lembaga pemerintah yang disesuaikan dengan target pembangunan nasional. Strategi-strategi ini dilengkapi dengan metrik keberhasilan yang jelas dan sasaran yang terukur, sehingga memungkinkan lembaga-lembaga untuk memastikan hasil kinerja mereka. Mencapai efisiensi birokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemotongan anggaran dalam jangka menengah. Praktik-praktik yang mengarah pada efisiensi harus dikembangkan secara sistematis, karena kebijakan yang bersifat sementara mungkin tidak menjamin pencapaian efisiensi yang berkelanjutan. Upaya meningkatkan efisiensi harus dimulai dengan penyempurnaan pola penggunaan anggaran pada saat perencanaan hasil kinerja. Pada tahun 2018, untuk mempercepat implementasi akuntabilitas kinerja, telah dilakukan bimbingan teknis dan dukungan untuk 83 kementerian atau lembaga yang mencakup 418 satuan kerja, 34 pemerintah provinsi yang terdiri dari 1.027 unit operasi (OPD), dan 518 kabupaten atau kota dengan 20.756 OPD (Yunita, 2019).

Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah ialah kewajiban lembaga pemerintah untuk bertanggung jawab atas pencapaian dan kegagalan dalam mencapai misi organisasi serta mencapai tujuan dan objek yang telah ditentukan. Hal ini ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Mudrikah (2020) mencatat bahwasannya akuntabilitas ini mempunyai keterkaitan yang erat terhadap siklus anggaran tahunan pemerintah, yang mencerminkan kemajuan menuju tujuan dan target yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah terkait wajib memberikan penjelasan dan penjelasan mengenai tingkat kinerja yang dicapai. Hasil kinerja tersebut kemudian didokumentasikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (LAKIP) (Putra, 2020)

Dari studi (Darma, 2019) ditemukan bahwa penerapan norma akuntansi pemerintahan berdampak baik dan penting terhadap tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika standar akuntansi pemerintah diterapkan secara efektif, hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Laporan finansial bidang publik memainkan peran krusial dalam mendorong akuntabilitas bidang publik. Peningkatan fokus pada akuntabilitas publik memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan sektor publik, terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk laporan finansial. (Langelo et al, 2015). Akuntansi bidang publik memiliki peran sentral dalam menyusun laporan finansial sebagai bagian dari amanah akuntabilitas publik. Untuk menjamin akuntabilitas yang kuat, laporan finansial yang disajikan harus memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kualitas laporan finansial telah ditetapkan sebagai standar normatif yang wajib dicapai dalam penyampaian informasi akuntansi guna mencapai tujuannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karena laporan finansial memainkan peran penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka penting bagi laporan finansial pemerintah untuk disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan.

Berdasarkan beberapa studi sebelumnya seperti studi yang dilakukan oleh (Ridzal, 2020) ditemukan apabila Kualitas laporan finansial memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua faktor tersebut. Sebaliknya, ada perbedaan dalam temuan terkait variabel "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Lembaga Pemerintah," seperti yang diungkapkan dalam studi Mudrikah dan Karlina (2020), yang menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berdampak positif dan terlihat jelas terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah.

Perbedaan antara studi sebelumnya dan studi ini adalah pada periode observasi dan objek studi yang diambil. Studi sebelumnya dilakukan pada tahun 2020 dan objek studinya kota Binjai. Sedangkan studi ini pada 2022 dan objek studinya yaitu di Provinsi Sumatera Barat. Keunikan dan kekuatan studi adalah penulis menulis bahwa studi ini sangat penting dilakukan karena menjadi salah satu instrument dalam mengamati suatu akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dalam suatu lembaga untuk mendapatkan suatu keberhasilan.

METODE STUDI

Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan teknik analisis data regresi berganda. Populasi dari studi ini ialah pegawai yang bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan pemilihan sampel melalui *convenience sampling*, dimana responden dipilih berdasarkan kesediaannya untuk mengikuti survei kuesioner. Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan penyebaran angket, di mana responden diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan tertulis. Validitas dan reliabilitas instrumen data dinilai melalui tes validitas dan reliabilitas, yang menentukan kesesuaian item pertanyaan untuk menentukan variabel dan menjamin stabilitas dan konsistensi responden dalam menjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tes Instrumen data

a. Tes Validitas

Tes validitas dimanfaatkan untuk memastikan apakah instrumen studi efektif mengukur konstruk yang dimaksudkan. Instrumen dengan validitas tinggi mengukur secara akurat aspek atau variabel yang ditargetkan.

1) Tes Validitas Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Nilai referensi pada tabel r dengan tingkat signifikansi α (0,05) ialah 0,312, sementara itu hasil pengtesan validitas variabel X adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Tes Validitas Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Butir pertanyaan	r- hitung	R – tabel 5%	Keterangan
X1.1	0.71833	0.312	Valid
X2.2	0.87562	0.312	Valid
X3.3	0.84826	0.312	Valid
X4.4	0.87038	0.312	Valid
X5.5	0.82258	0.312	Valid
X6.6	0.88865	0.312	Valid
X7.7	0.87045	0.312	Valid

Sumber : data primer yang diolah sspss versi 15,2023

Dilihat berdasarkan hasil tes validitas dari variabel implementasi standar akuntansi pemerintah, dapat disimpulkan bahwa nilai r-hitung lebih besar daripada nilai r-tabel (0,312), memperlihatkan bahwa semua pertanyaan telah sesuai dengan kriteria validitas yang ditetapkan.

2) Tes Validitas Kualitas Laporan Finansial

Dengan nilai r-tabel dengan taraf signifikansi α (0,05) sebesar 0,312, berikut adalah hasil dari tes validitas variabel Y:

Tabel 2. Hasil Tes Validitas Kualitas Laporan Finansial

Butir pertanyaan	r - hitung	r – tabel 5%	Keterangan
Y2.1	0.875028	0.312	Valid
Y2.2	0.74685	0.312	Valid
Y2.3	0.741071	0.312	Valid
Y2.4	0.824837	0.312	Valid
Y2.5	0.767747	0.312	Valid
Y2.6	0.826732	0.312	Valid
Y2.7	0.838917	0.312	Valid
Y2.8	0.876938	0.312	Valid
Y2.9	0.844732	0.312	Valid
Y2.10	0.744156	0.312	Valid

Sumber : data primer yang di olah spss versi 15,2023

Berdasarkan tes validitas pada variabel kualitas laporan finansial, diperoleh kesimpulan bahwa nilai r-hitung melebihi nilai r-tabel (0,312), yang menginformasikan bahwa semua pertanyaan telah memadai kriteria validitas yang telah ditetapkan.

3) Tes Validitas Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah

Dengan nilai r-tabel dengan taraf signifikansi α (0,05) yaitu 0,312, berikut adalah hasil tes validitas variabel Z:

Tabel 3. Hasil Tes Validitas Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah

Butir pertanyaan	r- hitung	r-tabel 5%	Keterangan
Z.1	0.88158	0.312	Valid
Z.2	0.77783	0.312	Valid
Z.3	0.74625	0.312	Valid
Z.4	0.80398	0.312	Valid
Z.5	0.7618	0.312	Valid
Z.6	0.76441	0.312	Valid
Z.7	0.78579	0.312	Valid
Z.8	0.88058	0.312	Valid
Z.9	0.81518	0.312	Valid
Z.10	0.73818	0.312	Valid

Sumber :data primer yang diolah spss versi 15,2023

Tes validitas pada variabel kualitas laporan finansial memperlihatkan bahwa nilai r-hitung melebihi nilai r-tabel (0,312), menunjukkan bahwa semua pertanyaan telah memenuhi kriteria validitas yang telah ditetapkan.

b. Tes Reliabilitas

Tes keandalan atau reliabilitas dilaksanakan terhadap item kuesioner yang telah dinyatakan valid untuk menilai keandalan alat ukur yang dipergunakan. Pada studi ini, analisis reliabilitas mempergunakan rumus Cronbach's alpha melalui perangkat lunak SPSS, dan berikut adalah hasilnya:

Tabel 4. Hasil Tes Reliabilitas Pada Semua Variabel

Variabel	Nilai yang ditetapkan	nilai Cronbach alpha	Kesimpulan
Implementasi Standar Akuntansi (X)	0.06	0.952	Reliabel
Kualitas Laporan Finansial (Y)	0.06	0.940	Reliabel
Kinerja Lembaga Pemerintah (Z)	0.6	0.934	Reliabel

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa variabel independen, yaitu implementasi standar akuntansi (X) dan kualitas laporan finansial (Y), memiliki nilai *Cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0.6. Demikian pula, variabel dependen, yaitu kinerja lembaga pemerintah (Z), juga mempunyai nilai *Cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0.6. Lalu, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut dapat dianggap reliabel.

2. Tes Asumsi Klasik

a. Tes Normalitas

Menurut (Abdullah, 2015) tes normalitas data berfungsi sebagai alat menilai data dalam studi apakah sudah berdistribusi normal, baik mencakup aspek multivariat maupun univariat. Selain itu, tes normalitas juga penting sebagai bukti bahwa sampel data diambil dari populasi yang berpola distribusi normal. Dalam studi ini, peneliti memilih tes *Kolmogorov-Smirnov* satu sampel. Jika nilai melebihi 0,05 itu artinya menunjukkan sebaran data normal; sebaliknya apabila nilainya di bawah 0,05 kurva distribusi data dianggap tidak berbentuk normal.

Tabel 5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.42942354
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		.783
Asymp. Sig. (2-tailed)		.575

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Dari hasil tes normalitas menggunakan tes one-sample Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi (2-tailed) senilai 0,951, yang melebihi 0,05, dapat ditarik kesimpulan jika distribusi residual adalah normal.

3. Tes Hipotesis

a. Uji T

Pada tingkat signifikansi 5%, pengtesan ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel bebas menunjukkan dampak parsial pada variabel terikat. Apabila nilai t hitung lebih tinggi dari nilai t kritis, Variabel bebas telah terbukti memiliki dampak yang signifikan pada variabel dependen, sesuai dengan hasil pengtesan

hipotesis alternatif (Ha). Disisi lain, jika nilai t hitung lebih rendah dari nilai t kritis, maka hipotesis nol (Ho) diterima, dan hipotesis alternatif (Ha) tidak diterima, menunjukkan bahwa variabel independen tidak berdampak secara signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (Priyatno, 2014). Berikut adalah hasil evaluasi dampak parsial dari variabel bebas, seperti implementasi standar akuntansi (X) dan kualitas laporan finansial (Y), terhadap variabel terikat yakni akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah (Z), seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Tes Parsial (Tes t)

Variabel	T -tabel	T –hitung	Nilai	Sig	Kesimpulan
Implementasi standar akuntansi	2,026	3,802	0,05	0,001	H1 diterima
Kualitas laporan finansial	2,026	3,229	0,05	0,003	H2 diterima

Sumber: data primer yang diolah spss versi 15, 2023

Dari tabel tersebut, hasil pengtesan hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dengan taraf signifikansi $0,05/2=0,025$ dan derajat kebebasan (df) = n - k atau $40 - 2 = 38$, didapatkan nilai kritis dari T tabel sebesar 2,026. Nilai t hitung di tabel adalah 6,215. Dikarenakan nilai t hitung (6,215) melebihi nilai t kritis (2,026) dan tingkat signifikansi (0,000) kurang dari 0,05, maka H1 diterima sementara Ho ditolak. Dengan demikian, dapat disarikan bahwa dalam beberapa kasus, penerapan standar akuntansi secara khusus berperan dalam meningkatkan tingkat akuntabilitas kinerja lembaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Dengan taraf kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 0,05$), nilai kritis T tabel adalah 2,026 dengan derajat kebebasan (df) = 38. Nilai t yang dihitung dari tabel adalah -0,345. Karena nilai t yang dihitung lebih kecil dari nilai t kritis, serta tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis alternatif (H2) ditolak dan hipotesis nol (Ho) diterima. Kesimpulannya adalah bahwa kualitas laporan finansial tidak berdampak pada akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah di Provinsi Sumatera Barat.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Sujarweni (2016), menjelaskan bahwa regresi Tes regresi multivariat yang bertujuan untuk mengevaluasi efek dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari tes regresi dapat dijelaskan melalui persamaan regresi yang tertera berikut ini:

Tabel 6. Hasil Tes Regresi Berganda

Variabel independen	Unstandardized coefficients B	Hubungan
(constant)	5,396	
Implementasi standar akuntansi	0,449	Positif
Kualitas laporan finansial	0,421	positif

Sumber: data primer yang diolah spss versi 15,2023

Dari hasil tabel di bawah ini, dapat diperoleh rumusan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,396 + 0,449 X + 0,421Z \tag{1}$$

Dengan menggunakan rumus yang telah dihasilkan, kesimpulannya dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Dalam persamaan tersebut, nilai konstan 5,396 menunjukkan tingkat dasar akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, tanpa memperhitungkan variabel bebas seperti penerapan standar akuntansi dan kualitas laporan finansial.
- 2) Dalam model konstan, peningkatan satu unit variabel penerapan standar akuntansi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga sebesar 0,449, sesuai dengan koefisien regresi X1 yang bernilai 0,449.
- 3) Secara spesifik, peningkatan satu unit kualitas laporan finansial dihubungkan dengan penurunan akuntabilitas kinerja lembaga sebesar -0,0421, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien regresi X2 yang bernilai -0,0421.

c. Tes Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Mansuri, 2016), koefisien determinasi menjelaskan sejauh mana variasi dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Angka *R Square* berfungsi sebagai ukuran yang digunakan dalam koefisien determinasi, yang mencerminkan kemanjuran model dalam menjelaskan varians variabel terikat. Nilai *R Square* yang disesuaikan, yang bersumber dari tabel ringkasan model, digunakan untuk memperhitungkan jumlah prediktor dalam model.

Tabel 7. Tes Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767	.589	.566	3.52089

a Predictors: (Constant), Kualitas laporan finansial, Implementasi standar akuntansi pemerintahan

Dari tabel, tingkat penyesuaian R-Squared yang mencapai 0,566 mengindikasikan bahwa 56,6% dari variasi variabel terikat bisa dipaparkan oleh variabel bebas. Sisanya, sebesar 43,4%, didampaki oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model studi ini. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa persentase kontribusi dari implementasi standar akuntansi dan kualitas laporan finansial secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja lembaga yaitu sebesar 56,6%, dengan 43,4% sisanya terdampak oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam studi ini.

Menurut hasil telaah yang telah dilakukan, 56,6% (0,566) dari variabilitas variabel akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah (Z) bisa dipaparkan oleh variabel penerapan standar akuntansi (X) dan laporan finansial (Y), sementara 43,4% sisanya didampaki oleh variabel eksternal lain dalam model regresi.

Pembahasan

1. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah

Analisis statistik menunjukkan jika nilai signifikansi penerapan batas minimal akuntansi sebesar 0,001 tidak mencapai standar $\alpha = 0,05$ sehingga diterima H1. Temuan studi mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan dan positif antara penerapan standar akuntansi dan tingkat akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Ini menenggambarkan apabila peningkatan implementasi mengarah

pada peningkatan akuntabilitas di lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat.

Temuan studi ini selaras dengan studi sebelumnya yang dilakukan (Dito Aditia Darma, 2019) dan (Juliastuti, 2022) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan standar akuntansi dengan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Ini menggambarkan bahwa pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan yang efektif, memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh semua pemangku kepentingan, dapat mengarah pada peningkatan akuntabilitas.

2. Dampak Kualitas Laporan Finansial Terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah

Dilihat dari output pengolahan statistik, nilai signifikansi yang terkait dengan kualitas laporan finansial $> 0,05$ yaitu 0,003 yang dengan itu mendukung penerimaan H2. Hasil tersebut mengandung makna yaitu kualitas dari laporan finansial memiliki dampak positif terhadap variabel Y yaitu akuntabilitas kinerja lembaga. Oleh karena itu, pelaporan finansial yang lebih berkualitas berkorelasi dengan peningkatan akuntabilitas di lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat.

Temuan dari studi ini sejalan juga dengan studi yang dikerjakan oleh (Peilouw, 2023) dan (Reza, 2022) yang mengemukakan jika kualitas laporan finansial berdampak negatif terksit dengan akuntabilitas dari kinerja lembaga pemerintah.

KESIMPULAN

Dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa ketaatan terhadap standar akuntansi meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah secara signifikan, hal ini menunjukkan bahwa penerapan yang lebih baik akan meningkatkan akuntabilitas. Kualitas laporan finansial berkorelasi positif dengan akuntabilitas lembaga pemerintah, dan kualitas laporan yang lebih tinggi memberikan dampak yang menguntungkan terhadap akuntabilitas.

Studi ini bertujuan untuk menjadi referensi berharga bagi peneliti lain atau peneliti masa depan yang melakukan studi serupa. Untuk membantu upaya studi di masa depan, penulis merekomendasikan untuk memilih waktu yang tepat untuk melakukan studi untuk memastikan relevansi dan ketepatan waktu. Selain itu, disarankan juga untuk memasukkan variabel-variabel terkait ke dalam studi ini, karena akuntabilitas kinerja lembaga terdampak oleh berbagai faktor di luar faktor-faktor yang dieksplorasi dalam studi ini.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, P. M. (2015). Living In The World That Is Fit For Habitation : CCI's Ecumenical And Religious Relationships. In *Aswaja Pressindo*.
- Dito Aditia Darma. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah P. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 30–43.
- Herawati, N. F. D. H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Akuntansi Unihaz-Jaz*, 1(2), 19–35.
- Juliastuti, F. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 133–151.
- Langelo et al. (2015). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 7(2), 173–181.
- Mansuri. (2016). Modul Praktikum Eviews Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Eviews. In *Modul Praktikum Eviews* (p. 54). Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.
- Meliana, D. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Garut). *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1).
- Noormansyah, I. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Asn, Dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 618 – 627.
- Peilouw, C. T. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Kupang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 5(1), 111–122.
- Priyatno, D. (2014). *Spss 22 Pengolah Data Terpraktis*. Cv Andi Offset.
- Putra, G. H. (2020). Analisis Dana Dekonsentrasi Sektor Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pundi*, 4(3), 305–318. <https://doi.org/10.31575/jp.v4i3.306>
- Reza, M. F. (2022). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Binjai (Studi Kasus Pada Bpkpad Kota Binjai). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 31–50.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 7(2), 172–181.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Pustaka Baru Press.
- Yunita. (2019). *Terapkan SAKIP, Wilayah III Hemat Anggaran Rp 6,9 Triliun*. Berita Suara Com.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)